

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KECAMATAN SERIRIT TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seririt Tahun 2025 dapat tersusun sesuai dengan rencana. Penyusunan LKjIP sebagai pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, merupakan bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kami dalam tahun 2025.

Dengan tersusunnya LKjIP Kecamatan Seririt Tahun 2025 ini, diharapkan akan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta sekaligus sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP yang kami susun ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami membuka diri untuk senantiasa menerima masukan, saran maupun kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunannya.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan LKjIP ini.

Seririt, 2 Januari 2026

CAMAT SERIRIT



I PUTU SATRIAWAN, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19840525 201001 1 029

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	3
1.5 Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia.....	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 9
2.1 Rencana Strategis Organisasi	9
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
2.3 Perjanjian Kinerja.....	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	43
 BAB IV PENUTUP	 47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Langkah Perbaikan ke depan.....	47

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
Tabel 1.1	Luas Wilayah Kecamatan Seririt per Desa	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Seririt Tahun 2025.....	5
Tabel 1.3	Rincian personil berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.4	Rincian personil berdasarkan Jabatan	7
Tabel 1.3	Rincian personil menurut Pendidikan (ASN dan Non ASN).....	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	9
Tabel 2.1	Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kecamatan Seririt.....	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Seririt Tahun 2025	14
Tabel 2.4	Program dan Jumlah Kegiatan Prioritas Kecamatan Seririt Tahun 2025.....	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	17
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dan Tahun 2023	17
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan Tahun 2025	18
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja tahun 2025 dan Target Akhir Renstra.....	19
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Kecamatan Seririt dengan Kecamatan Busungbiu ...	20
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan 2025.....	21
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1	22
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2	23
Tabel 3.9	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	23
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3	24
Tabel 3.11	Rekapitulasi Laporan Swadaya Murni Tahun 2024 dan 2025	26
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4.....	27
Tabel 3.13	Tabel Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	28
Tabel 3.14	Analisis Capaian Target Kinerja dan Efesiensinya.....	30
Tabel 3.15	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Pencapaian Target Kinerja	32
Tabel 3.16	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kecamatan Seririt Tahun 2025 ..	43
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	44
Tabel 3.18	Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran.....	46
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran per Indikator.....	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan. Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan sangat berperan untuk membantu Pemerintah Kabupaten di dalam pengendalian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Seririt yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Seririt Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi Kecamatan Seririt, telah ditanda tangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kecamatan Seririt terdapat 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 Kecamatan Seririt sudah tercapai. Dari 4 (empat) indikator kinerja ada 1 (dua) indikator mencapai target yaitu Prosentase pelaksanaan pemerintahan desa yang baik dan Prosentase penanganan Trantibum di Kecamatan. Sedangkan 3 (dua) indikator lainnya melampaui target yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat di Kecamatan.

Dari alokasi dana yang tersedia untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp.8.598.694.124,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.155.013.361,00 dengan persentase 94,84 %. Sedangkan dana yang tersisa merupakan efisiensi dana dari kegiatan yang dilaksanakan.

Tujuan Kecamatan Seririt sesuai dengan yang tertuang di RENSTRA 2025-2029 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan di Kecamatan yang berintegritas. Untuk Mencapai tujuan tersebut Kecamatan Seririt menetapkan 4 sasaran yaitu :

1. Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif dengan indikator “Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah” Target nilai sakip Kecamatan Seririt Tahun 2025 adalah sebesar 60,12. Realisasi nilai sakip Kecamatan Seririt tahun 2025 adalah sebesar 60,12. Faktor pendukung keberhasilan akuntabilitas kinerja antara lain: adanya motivasi yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk SKPD agar mencapai nilai sakip B, peran APIP dalam memberikan arahan perbaikan apabila

ditemukan hal-hal yang menyimpang pada SKPD, peran APIP dalam memberikan nilai tambah kepada SKPD sebagai sumber yang objektif melalui saran-saran yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, dan pengawasan kualitas laporan keuangan yang memiliki korelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Faktor penghambat akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Seririt adalah kurangnya pemahaman pegawai terhadap sakip dan komitmen sebagian pegawai pada Kecamatan Seririt terhadap implementasi sakip masih belum tinggi. Sedangkan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kecamatan Seririt untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan pemahaman pegawai terhadap sakip dengan melakukan coaching sakip dan meningkatkan komitmen pegawai terhadap implementasi sakip dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, memberikan reward dan punishment non material seperti pujian dan teguran pada saat monev serta menciptakan suasana kerja yang profesional dan kondusif.

2. Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal dengan indikator “Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan”. Target Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan Tahun 2025 93,15% dengan realisasi capaian melampaui target yaitu 94,16% adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan sasaran ini dapat tercapai diantaranya: Sikap Pelayanan (Attitude), Sikap petugas yang sopan, ramah, dan empatik sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Memiliki motivasi dan kepuasan kerja yang tinggi dapat mendorong petugas untuk memberikan pelayanan terbaik, Integritas dan Akuntabilitas, Petugas yang berintegritas dan bertanggung jawab akan memastikan setiap tugas diselesaikan sesuai prosedur dan target serta Aturan yang Sederhana, Prosedur pelayanan yang ringkas dan mudah dipahami mencegah kerumitan dan kebingungan bagi masyarakat.
3. Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator “Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan”. Target Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tahun 2025 sebesar 0,4% dengan realisasi capaian melampaui target yaitu 3,01% adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan sasaran ini dapat tercapai diantaranya: Partisipasi Aktif Masyarakat, Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program adalah kunci keberhasilan, Keterbukaan Informasi masyarakat memiliki akses yang mudah ke informasi yang relevan dan tepat guna untuk program pemberdayaan, Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya, baik manusia (SDM) maupun finansial, serta sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan program. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya, baik manusia (SDM) maupun finansial, serta sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan program.

4. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan dengan indikator “Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa”. Target Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 sebesar 2,94 % dengan realisasi capaian melampaui target yaitu 3,25 % adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan sasaran ini dapat tercapai diantaranya: Dukungan dan Pembinaan Kecamatan: Pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang efektif dari pihak kecamatan berperan penting dalam meningkatkan kinerja aparat desa, Transparansi dan Akuntabilitas: Adanya sistem pengelolaan keuangan dan informasi yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong kinerja yang lebih baik, Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Fasilitas kerja yang memadai, seperti perangkat komputer dan akses transportasi, mendukung kelancaran operasional pemerintah desa serta Sistem Pengelolaan Administrasi yang Teratur: Administrasi desa yang tertata dengan baik mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan Undang-undang tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada pedoman yang diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Seririt diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Seririt Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;

2. Undang - undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah telah dilaksanakan sehingga LKjIP merupakan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Seririt Tahun 2025 atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2025.
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Seririt Tahun 2025 bagi upaya-upaya perbaikan dimasa mendatang.

LKJIP dapat memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai penghematan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian Pemerintahan Kecamatan Seririt tentunya harus berupaya untuk dapat mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang good governance sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, pemerintah Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;

- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- j) melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

1.4.1 Kondisi Geografi

Kecamatan Seririt terletak di sebelah barat Kota Singaraja, dengan Jarak 20 km dari kota Kecamatan Seririt menuju kota Singaraja merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 20 Desa dan 1 Kelurahan, 25 Desa Adat, dan 80 Banjar Dinas, dengan Jumlah Penduduk : 91.805 jiwa dengan Laki-laki 45.965 orang dan Perempuan 45.840 orang

Kecamatan Seririt memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Utara : Laut Bali
- Timur : Kecamatan Banjar
- Selatan : Kecamatan Busungbiu
- Barat : Kecamatan Gerokgak

Kedudukan Kecamatan dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Seririt memiliki luas wilayah 111,78 Km2 km² atau 12,29 % dari luas Kabupaten Buleleng. Luas Wilayah masing-masing desa dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan Seririt Per Desa/Kelurahan

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH km²	PERSENTASE LUAS WILAYAH (%)
1	Kalianget	3,36	3
2	Joanyar	2,87	2,5
3	Tangguwisia	1,34	1,1
4	Sulanyah	0,91	0,8
5	Bubunan	2,54	2,2
6	Ringdikit	3,45	3
7	Rangdu	1,18	1
8	Mayong	7,48	6,6
9	Bestala	0,94	0,8
10	Munduk Bestala	2,54	2,2
11	Gunungsari	3,72	3,3
12	Patemon	2,82	2,5

13	Seririt	2,23	1,9
14	Pengastulan	2,31	2
15	Lokapaksa	28,87	25,8
16	Ularan	2,71	2,4
17	Unggahan	20,58	18,4
18	Umeanyar	2,58	2,3
19	Banjarasem	4,22	3,7
20	Kalisada	3,10	2,7
21	Pangkungparuk	11,72	10,4
	Jumlah	111,78	100

1.4.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Seririt tahun 2025 sebanyak 91.805 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki jiwa 45.965 jiwa (50,06%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 45.840 jiwa (49,93)%.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Seririt Tahun 2025

NO	NAMA DESA/KEL.	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	(L+P)
1	Kalianget	2.538	2.425	4.963
2	Joanyar	1.860	1.735	3.595
3	Tanguwisia	1.289	1.334	2.623
4	Sulanyah	1.205	1.138	2.343
5	Bubunan	2.228	2.346	4.574
6	Ringdikit	2.186	2.094	4.280
7	Rangdu	767	785	1.552
8	Mayong	2.320	2.289	4.609
9	Bestala	644	694	1.338
10	Munduk Bestala	548	555	1.103
11	Gunungsari	1.761	1.781	3.542
12	Patemon	4.011	3.859	7.870
13	Seririt	3.941	3.846	7.787
14	Pengastulan	2.446	2.573	5.019
15	Lokapaksa	6.454	6.173	12.627
16	Ularan	1.302	1.340	2.642
17	Unggahan	1.611	1.715	3.326
18	Umeanyar	857	845	1.702

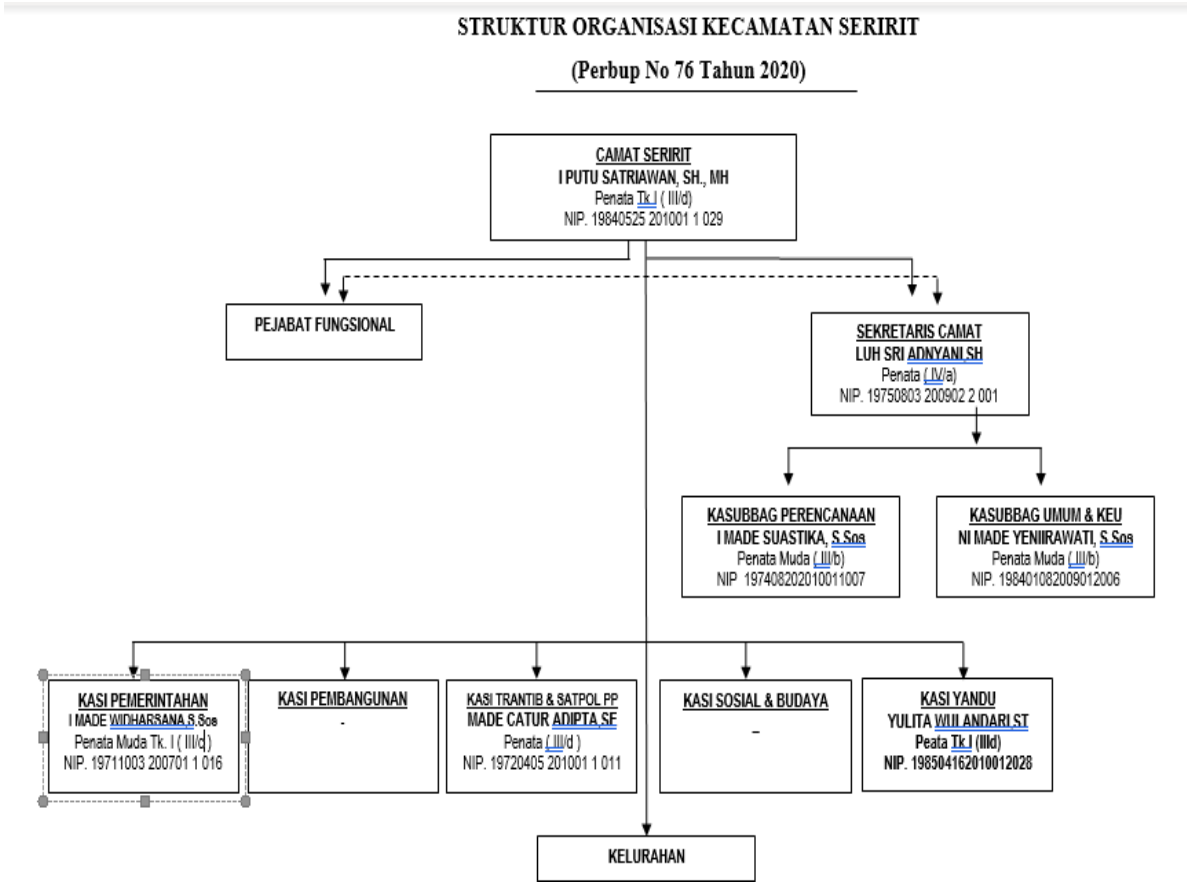
19	Banjarasem	3.915	3.646	7.561
20	Kalisada	1.332	1.792	3.114
21	Pangkungparuk	3.617	3.720	7.337
	JUMLAH	45.965	45.840	91.806

1.5 Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 menetapkan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng, antara lain mencakup pula Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan yang terdiri dari:

1. Camat : 1 orang dengan eselon III.a
2. Sekretaris Kecamatan : 1 orang dengan eselon III.b
3. Kepala Seksi : 5 orang dengan eselon IV.a
4. Lurah : 1 orang dengan eselon IV.a
5. Sekretaris Lurah : 1 orang dengan eselon IV.a
6. Kepala Sub Bagian : 2 orang dengan eselon IV.b
7. Kepala Seksi Kelurahan : 3 orang dengan eselon IV.b
8. Jabatan Fungsional : -

Untuk lebih jelasnya mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dapat dilihat dalam bagan berikut:



Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kecamatan Seririt didukung oleh 95 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rincian personil berdasarkan Golongan

Tabel 1.3
Rincian personil berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan IV	-	1	1
2	Golongan III	19	6	25
3	Golongan II	11	3	14
4	PPPK Golongan IX	7	12	19
5	PPPK Golongan VII	1	-	1
6	PPPK Golongan V	14	10	24
7	PPPK Paruh Waktu	6	1	7
8	Tekon/Kepala Lingkungan	4	-	4
	Jumlah	62	33	95

- b. Rincian personil berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.4
Rincian personil berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	L	P	JUMLAH
1.	Struktural			
1	Eselon III	2		2 orang
2	Eselon IV	7	3	10 orang
3	Fungsional	-	-	-
4	Staf			
5	PNS	21	7	28 orang
6	PPPK	22	22	44 orang
7	PPPK Paruh Waktu	6	1	7 orang
8	Tekon/Kepala Lingkungan	4	-	4
	TOTAL	62	33	95 orang

c. Rincian personil menurut Pendidikan (ASN dan Non ASN) :

Tabel 1.5
Rincian personil menurut Pendidikan (ASN dan Non ASN)

Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
	PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Kepala Lingkungan (Kaling)	
S3 :	-				
S2 :	3				3
S1 :	15	20	1	1	37
Sarmud/D3 :	3				3
D2					
SLTA :	18	24	5	1	48
SLTP :	2			2	4
SD :			1		1
JUMLAH :	40	44	7	4	95

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik Organisasi

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, Nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seririt Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun oleh Kecamatan Seririt beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Dalam upaya untuk meningkatkan akutabilitas, Pemerintah Kecamatan Seririt telah menetapkan indikator kerja dengan memperhatikan tugas dan fungsi, pelimpahan kewenangan, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hal tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Seririt Tahun 2025.

Tabel 2.1

Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kecamatan Seririt

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN (%)						KE T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan di Kecamatan Yang berintegritas	Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60,12	60,15	60,20	60,21	60,22	60,23	
		Terwujudnya kinerja pelayanan publik di kecamatan yang optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	93,15	93,20	93,25	93,30	93,35	93,40	
		Meningkatnya kinerja pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	0,40	3,52	3,5	3,5	3,5	3,5	
		Meningkatnya kinerja pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Persentase peningkatan kinerja pemerintahan desa	2,94	5,71	6,76	7,59	8,24	8,70	

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut maka perlu dibuat program-program yang selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun program dan Kegiatan serta sub kegiatan untuk Tahun 2025 adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 6 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

dengan 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja

- Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan :
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Dengan 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan.
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan penegasan Batas Desa

- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Secara sederhana Indikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai.

Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi. Pemilihan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Seririt memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu: Spesifik, dapat dicapai, Relevan, Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan Dapat dikualifikasi dan diukur. Untuk lebih jelasnya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seririt Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SERIRIT TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM HITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Kinerja Perangkat daerah (capaian kinerja tahun berkenaan perangkat daerah dalam satuan persen)	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat	Camat Seririt
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	Tercapainya kinerja pelayanan di kecamatan (rata2 capaian kinerja pelayanan dan trantibumlinmas tahun berkenaan dalam satuan persen)	1. Persentase Pelayanan kewenangan Kecamatan 2. Persentase Koordinasi Trantibumlinmas yang ditinjaklanjuti	Camat Seririt
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (dalam satuan persen)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Camat Seririt
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa (dalam satuan persen)	Persentase tertib administrasi pemerintahan Desa	Camat Seririt

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja sebagai wujud komitmen dalam hubungan meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Pemerintah Kecamatan Seririt telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Seririt Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	60,12
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	%	93,15
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	%	0,40
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	%	2,94

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program prioritas Kecamatan Seririt. Adapun program dan jumlah kegiatan prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Program dan Jumlah Kegiatan Prioritas Kecamatan Seririt Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7.831.250.793	6 Kegiatan	Ksb Umum/Keuangan dan Ksb Perencanaan
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	197.953.026	5 Kegiatan	Kepala Seksi Paten dan Kepala Seksi Linmas Trantib Pol PP
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	406.071.240	2 Kegiatan	Kepala Seksi Sosbud dan Kelurahan
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	163.419.065	1 Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pembangunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Seririt merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Seririt untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Seririt Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik atau akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Seririt selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja Kecamatan Seririt didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seririt Tahun 2025. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Seririt Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60.12 %	60,12 %	100 %
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	93.15%	94.416%	100 %
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	0.40 %	3.01 %	100 %
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	2.94%	3,25%	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 3 indikator kinerja diatas sekiranya sudah melampaui target yaitu Indikator Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan, Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2023	2022
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	100%	100%
2	Meningkatnya Kwalitas Penyelenggara n Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kwalitas Pembangunan Desa/Keluirahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDM Status Maju dan Mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase laporan gangguan ketentraman dan bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
	Rata – rata Capaian Kinerja		96,25 %	96,25%	96,25%	96,25%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	82	60.12 %	89	60,12 %	100%	100%
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	100%	93.15%	100%	94.41%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	15%	0.40 %	15%	3,01 %	100%	100%
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	100%	2.94%	100%	3,25%	100%	100 %
	Rata – rata Capaian Kinerja		74,25 %	39,15%	76,00%	40,19%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 36 % dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pergantian Kepemimpinan Bupati Buleleng Periode 2025-2029 dengan Visi misi, sasaran dan Indikator Kinerja yang berbeda.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja tahun 2025 dan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2025	%
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60.12 %	60,12 %	100%
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	93.15%	94.416%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	0.40 %	3.01 %	100%
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	2.94%	3,25%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbandingan capaian target kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra, ke empat indikator sudah semua mencapai target.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Kecamatan Lain

Perbandingan capaian kinerja penting dilakukan untuk perbaikan kinerja, SDM, maupun budaya kinerja. Perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan lain di Kabupaten Buleleng, akan coba dilakukan perbandingan dengan Kecamatan Busungbiu. Secara rinci, perbandiangan capaian kinerja Kecamatan Seririt dengan Kecamatan Busungbiu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Kecamatan Seririt dengan Kecamatan Busungbiu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kec Seririt	Realisasi Kec Seririt	Target Kec Busungbiu	Realisasi Kec Busungbiu	Selisih %
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60,12 %	60,12 %	96,79%	96,79%	0,321%
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	93.15%	94,41%	100%	100%	0%
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	0.40 %	3,01 %	1,60%	1,60%	9,840%
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	2.94%	3,25%	0,44	0,44	99,56%

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Seririt lebih tinggi dari capaian Kinerja Kecamatan Busungbiu. Capaian kinerja dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik untuk kedua Kecamatan tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Ada 1 indikator dengan capaian yang sama (100%) yaitu Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan. Sedangkan untuk indikator Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa, untuk capaian Kecamatan Seririt jauh lebih tinggi dibandingkan capaian Kecamatan Busungbiu.

6. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Seririt Tahun 2025 mengalami Penurunan

dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sebesar 36 % dari 76,00 % di tahun lalu menjadi 40,19 % di tahun sekarang. Terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian bahkan melebihi target kinerja antara lain, dukungan antar pegawai, yaitu adanya koordinasi yang baik di masing-masing seksi/bagian, selain itu komitmen yang tinggi juga menjadi faktor pendukung keberhasilan. Faktor kepemimpinan juga menjadi hal penting dalam mendukung keberhasilan, yaitu pemimpin yang dapat memberikan motivasi dan arahan kepada bawahan dan senantiasa terbuka atas masukan dari bawahan. Secara ringkas peningkatan/penurunan kinerja Kecamatan Seririt dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2025	%
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60.12 %	60.12 %	100%
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	93.15%	94.41%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	0.40 %	3,01 %	100%
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	2.94%	3.25%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Keterangan
			2024	2025	
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60,10%	60.12 %	Naik 0.2 %
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	99,34 %	94.41%	Turun
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	94,25%	3,01 %	Turun
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	90,41	3.25%	Turun
Rata - Rata			%	%	Turun

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun lalu dan tahun ini telah mencapai target yang telah ditentukan bahkan capaiannya lebih dari 100% meski tahun ini mengalami penurunan persentase sebesar 4,93. Hal ini mungkin dapat dikatakan kurang berarti namun ada baiknya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Seririt dengan cara tetap menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan di kecamatan, serta menambah jumlah responden pengguna layanan kecamatan.

Sementara untuk indikator Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik mengalami penurunan sebesar 6,16 %. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kompetensi aparatur desa dalam mengelola administrasi desa. Dapat dikatakan bahwa pembinaan maupun sosialisasi yang diberikan oleh Kecamatan maupun Instansi Vertikal lainnya sudah terlaksana dengan baik.

Untuk indikator prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat di Kecamatan mengalami peningkatan sebesar 2,61 % dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau dilihat dari rekapitulasi laporan swadaya murni masyarakat dapat dilihat bahwa nilai swadaya murni masyarakat mengalami peningkatan yang sangat besar dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan pemberdayaan di masyarakat.

Untuk Indikator Prosentase penanganan Trantibum di Kecamatan masih tetap sama dengan tahun lalu. Hal ini berkat sinergi dari Kecamatan instansi terkait dalam penanganan trantibum di Kecamatan. Sangatlah penting memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta pelatihan anggota Linmas untuk meningkatkan skil dalam penanganan masalah di masyarakat

6.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60.12 %	60.12 %	100 %

6.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	93.15%	94.41%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis 2 telah melampaui target.

Didalam sasaran 2 kinerja yang ingin dicapai adalah Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Rumusan yang digunakan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor: 14 Tahun 2017 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Metode digunakan dalam pengumpulan survey ini dengan menggunakan kuisioner

Kuesioner yang terkumpul berjumlah 300 lembar yang telah diisi dengan lengkap oleh responden. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Seririt hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Seririt sebesar 90,81 berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 88.31-100). Hasil survei secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.9

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun 2025.

<u>Keterangan :</u>	
- U1 s.d U9	: Unsur- Unsur Pelayanan
- NRR	: Nilai Rata-rata
- IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
- *)	: Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **)	: Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	: NRR per Unsur x 0,111
IKM UNIT PELAYANAN	: 90.81 A (Sangat Baik)

Mutu Pelayanan	:
A (Sangat Baik)	: 88.31-100
B (Baik)	: 76.61 – 88.30
C (Kurang Baik)	: 65.00 – 76.60
D (Tidak Baik)	: 25.00 – 64.99

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas kinerja pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan pada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dapat dikategorikan SANGAT BAIK dengan perolehan indeks kepuasan masyarakat sebesar 94,41 berada dalam interval 88.31-100. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Seririt Tahun 2025 adalah Baik (Minimal Nilai 82), sehingga pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 94,41 %.

4.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	0.40 %	3,01 %	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan laporan swadaya murni tahun 2024 dan tahun 2025. Laporan swadaya murni tahun 2024 sebesar Rp. 52,778,571,375, sedangkan laporan swadaya murni tahun 2025 sebesar Rp. 82,253,762,950. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 29,475,191,575 (55,85%). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis 3 melampaui target yang telah ditetapkan.

Didalam sasaran 3 kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatkan pemberdayaan

masyarakat di Kecamatan Seririt dengan indikator Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat di Kecamatan. Pembangunan di tingkat desa secara prinsip bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Kemandirian masyarakat dapat diukur menggunakan indikator-indikator keberhasilan pembangunan yakni salah satunya menggunakan indikator capaian swadaya murni masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik yang berazaskan gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Swadaya murni adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat baik berupa daya maupun dana untuk mewujudkan suatu pembangunan fisik maupun non fisik yang pengadaannya seluruhnya oleh masyarakat itu sendiri, karena didorong kepentingan, dibiayai dengan menggali kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, dimanfaatkan dan dipelihara pula oleh masyarakat. Dengan kata lain, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri tanpa adanya dorongan dari luar.

Keberhasilan capaian swadaya murni masyarakat dalam pembangunan ditingkat desa dinyatakan dengan meningkatnya jumlah swadaya murni masyarakat baik fisik atau non fisik setiap tahunnya yang dinyatakan dengan satuan rupiah. Keberhasilan pembangunan juga dilihat dari jumlah capaian swadaya murni masyarakat yang lebih besar daripada jumlah bantuan penunjang pembangunan di desa. Bantuan penunjang pembangunan merupakan seluruh dana/bantuan yang diperoleh masyarakat dari pihak ketiga termasuk program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah, swasta atau CSR setiap tahunnya. Capaian swadaya murni masyarakat nantinya dilaporkan secara berjenjang setiap triwulan oleh masing-masing desa kepada Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Untuk lebih jelasnya laporan swadaya murni masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
REKAPITULASI LAPORAN SWADAYA MURNI MASYARAKAT TAHUN 2025

TAHUN	TRI WULAN	JUMLAH KEGIATAN		SWADAYA MURNI		JUMLAH SWADAYA MURNI	BANTUAN PENUNJANG		JUMLAH SWADAYA PENUNJANG	TOTAL
		Fisik	Non Fisik	Fisik (Rp)	Non Fisik (Rp)	(Rp)	Fisik (Rp)	Non Fisik (Rp)	(Rp)	(Rp)
2024	I II III IV									
		89	596	438,677,000	14,788,447,500	15,227,124,500	816,109,625	277,510,000	1,093,619,625	16,320,744,125
		29	563	504,636,000	8,949,689,500	9,454,325,500	891,734,750	495,400,000	1,387,134,750	10,841,460,250
		91	422	604,336,000	14,647,685,000	15,252,021,000	210,861,000	112,170,000	323,031,000	15,575,052,000
		105	668	778,919,000	8,250,587,500	9,029,506,500	818,208,500	193,600,000	1,011,808,500	10,041,315,000
JUMLAH		314	2,249	2,326,568,000	46,636,409,500	48,962,977,500	2,736,913,875	1,078,680,000	3,815,593,875	52,778,571,375
2025	I II III IV									
		22	628	1,095,190,000	24,838,798,500	25,933,988,500	209,350,000	259,420,000	468,770,000	26,402,758,500
		24	496	2,511,675,000	12,145,822,500	14,657,497,500	1,121,370,000	199,114,000	1,320,484,000	15,977,981,500
		22	503	5,469,880,000	19,895,147,500	25,365,027,500	701,249,950	134,050,000	835,299,950	26,200,327,450
		67	405	3,275,510,000	9,648,072,500	12,923,582,500	616,113,000	133,000,000	749,113,000	13,672,695,500
JUMLAH		135	2,032	12,352,255,000	66,527,841,000	78,880,096,000	2,648,082,950	725,584,000	3,373,666,950	82,253,762,950
	TOTAL									
		449	4,281	14,678,823,000	113,164,250,500	127,843,073,500	5,384,996,825	1,804,264,000	7,189,260,825	135,032,334,325

4.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	2.94%	3.25%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis 4 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Didalam sasaran 4 kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehubungan indikator Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik mencapai 3,25% dari Target 2,94%, dimana dari 20 desa 1 Kelurahan, terdapat 14 sudah tertib dan tepat waktu dalam penyampaian dokumen laporan administrasi desa, terutama dari sisi dokumen-dokumen perencanaan yang memang secara regulasi harus terpenuhi dan disusun berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui prosentase desa /kelurahan dengan administrasi yang baik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

- a. Prosentase desa yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tepat waktu;
- b. Prosentase Desa yang menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tepat waktu;
- c. Prosentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu;
- d. Prosentase desa yang menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes) tepat waktu.
- e. Prosentase desa yang menerbitkan LKPP Desa tepat waktu ;
- f. Prosentase desa yang menerbitkan IPP Desa tepat waktu;
- g. Prosentase desa yang menerbitkan pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu.

Untuk lebih jelasnya, evaluasi administrasi pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.13
TABEL EVALUASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	JENIS ADMINISTRASI DESA													
		RPJM		RKP		APBDes		LPPDes		LKPP		IPP		LKPJ	
		TW	TTW	TW	TTW	TW	TTW	TW	TTW	TW	TTW	TW	TTW	TW	TTW
1	2	3		4		5		6		7		8		9	10
1	Kalianget	√		√		√		√		√		√		√	
2	Joanyar	√		√		√		√		√		√		√	
3	Tangguwisia	√		√		√		√		√		√		√	
4	Sulanyah	√		√		√		√		√		√		√	
5	Bubunan	√		√		√		√		√		√		√	
6	Ringdikit	√		√		√		√		√		√		√	
7	Rangdu	√		√		√		√		√		√		√	
8	Mayong	√		√		√		√		√		√		√	
9	Bestala	√		√		√		√		√		√		√	
10	Munduk Bestala	√		√		√		√		√		√		√	
11	Gunungsari	√		√		√		√		√		√		√	
12	Patemon	√		√		√		√		√		√		√	
13	Pengastulan	√		√		√		√		√		-		-	
14	Lokapaksa	√		√		√		√		√		-		-	
15	Ularan	√		√		√		√		√		√		√	
16	Unggahan	√		√		√		√		√		√		√	
17	Umeanyar	√		√		√		√		√		√		√	
18	Banjarasem	√		√		√		√		√		-		-	
19	Kalisada	√		√		√		√		√		√		√	
20	Pangkungparuk	√		√		√		√		√		√		√	
21	Kelurahan Seririt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KETERANGAN :
 TW : TEPAT WAKTU
 TTW : TIDAK TEPAT WAKTU

7. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Evaluasi Kinerja dimulai dengan menentukan nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran didasarkan nilai capaian kinerja tersebut.

Pengukuran Kinerja Pemerintahan Kecamatan Seririt periode tahun 2025 merupakan gambaran yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh atasan langsung sebagai pemberi tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt yaitu antara Bupati Buleleng sebagai pihak pemberi tugas dengan Camat sebagai pimpinan pada SKPD sebagai penerima tugas.

Analisis capaian kinerja merupakan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis kinerja Kecamatan Seririt menjelaskan perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah analisis capaian kinerja Kecamatan Seririt tahun 2025.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14

Analisis Capaian Target Kinerja dan Efesiensinya

No	Kategori	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Anggaran	
					Realisasi	%
A	Indikator Sasaran 1	60,12	60,12	100 %	7.446.577.788	95,09
1	Melebihi Target					
2	Sesuai Target			√		
3	Tidak mencapai target					
B	Indikator Sasaran 2	93,15 %	94,01%	100%	195.194.926	98,63
1	Melebihi Target			√		
2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
C	Indikator Sasaran 3	0,40 %	3,01 %	100 %	360.478.032	88,77
1	Melebihi Target			√		
2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
D	Indikator Sasaran 4	2,94%	3,25%	100%	152.762.615	93,48
1	Melebihi Target			√		
2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
	Rata - Rata			100%		94.84
	Tingkat Efesiensi					

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Seririt tahun 2025 telah melebihi target yaitu capaiannya lebih dari 100%, masing-masing antara lain realisasi atas indikator kinerja sasaran pertama yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mencapai 94,01 %, realisasi atas indikator kinerja sasaran ke empat Prosentase Desa dengan Administrasi yang Baik mencapai 100%, realisasi atas indikator kinerja sasaran ketiga yaitu Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat di Kecamatan mencapai 3,01 % dan realisasi atas indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase penanganan Trantibum di Kecamatan mencapai 100 % sehingga rata-rata capaian

kinerja sasaran Kecamatan Seririt tahun 2025 adalah sebesar 170,77% yang artinya berada pada kategori sangat baik dengan tingkat efesiensi 72.74%.

Keberhasilan dalam pencapaian atas target kinerja yang telah ditentukan senantiasa masih tidak dapat luput dari berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi, antara lain yaitu adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima; kapasitas aparatur kecamatan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang; belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja melayani. Selanjutnya solusi atas kendala dimaksud antara lain dengan cara membangun system pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan dengan pemanfaatan teknologi

Untuk hasil capaian kinerja pada tahun 2025 ini, selain karena faktor program dan kegiatan prioritas serta anggaran yang mencukupi juga di dukung adanya komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Seririt dengan memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung tereralisasinya target kinerja indikator kinerja utama, tanpa mengabaikan program/kegiatan lainnya.

8. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Pencapaian Target Kinerja

Analisis program, kegiatan, maupun sub kegiatan dibutuhkan dalam rangka mengukur capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang telah disediakan untuk mencapai target kinerja tersebut. Analisis dimaksud secara ringkas dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Pencapaian Target Kinerja

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	SASARAN STRATEGIS	ALASAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	Persentase capaian kinerja perangkat daerah telah tercapai	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tercapaiannya Kinerja Perangkat daerah (capaian kinerja tahun berkenaan perangkat daerah dalam satuan persen)
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	%	100	100	100	Persentase capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah telah tercapai		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	16	100	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah disusun sesuai target		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	26	26	100	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah tersusun sesuai target		
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	100	Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1	100	Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah		

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan	%	100	100	100	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah tercapai		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	91	91	100	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN telah tercapai sesuai target		
	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	100	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD telah tersusun sesuai target		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah tersusun sesuai target		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	12	100	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan	Laporan	12	12	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah telah tercapai		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	98	98	100	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian telah disusun		
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah telah tercapai sesuai target		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan telah tersedia sesuai kebutuhan		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan telah tersedia sesuai kebutuhan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan telah tersedia sesuai kebutuhan		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan telah tersedia sesuai kebutuhan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan telah tersedia sesuai kebutuhan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	Laporan Kunjungan Tamu telah terfasilitasi		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah dilaporkan		
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah telah tercapai		

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	100	Paket Mebel telah Disediakan		
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah telah tersedia sesuai kebutuhan		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah tersusun		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah Disediakan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah tersusun		
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah telah terpelihara		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	19	100	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	Unit	17	17	100	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	32	100	Peralatan dan Mesin Lainnya telah Dipelihara		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah Dipelihara/Direhabilitasi		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pelayanan Publik	%	95	100	100	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pelayanan Publik telah tercapai	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tercapainya kinerja pelayanan di kecamatan (rata2 capaian kinerja pelayanan dan trantibumlinmas tahun berkenaan dalam satuan persen)
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti		

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	100	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Layanan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	%	100	100	100	Persentase Pelaksanaan Layanan Urusan Pemerintahan di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase tindak lanjut Pemeliharaan Prasaran dan sarana Pelayanan Umum	%	100	100	100	Persentase tindak lanjut Pemeliharaan Prasaran dan sarana Pelayanan Umum		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dddam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dddam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	100	Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dddam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Seririt	%	100	100	100	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Seririt telah tercapai sesuai target	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (dalam satuan persen)
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	92	100	100	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	100	Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan telah tersusun		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	21	21	100	Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan telah tersusun		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	%	100	100	100	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan tercapai sesuai target	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tercapainya kinerja pelayanan di kecamatan (rata2 capaian kinerja pelayanan dan trantibumlinmas tahun berkenaan dalam satuan persen)
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	%	100	100	100	Ketentraman dan Ketertiban Wilayah telah terwujud		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	21	21	100	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan telah tersusun		
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait penegakan perda dan perkara yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait penegakan perda dan perkara telah ditindaklanjuti		

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	21	21	100	Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia telah tersusun		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	Prosentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah tercapai sesuai target	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa (dalam satuan persen)
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah terlaksana		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	20	20	100	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa telah tersusun		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	20	20	100	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa telah tersusun		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	20	20	100	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa telah tersusun		

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	20	20	100	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa telah tersusun		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	20	20	100	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawaran Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawaran Desa	Dokumen	20	20	100	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawaran Desa		
	Rekomendasi Pengangatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	20	20	100	Dokumen Rekomendasi Pengangatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	22	22	100	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa telah tersusun dan ditindak lanjuti		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	21	21	100	Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan telah tersusun		

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	21	21	100	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	21	21	100	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	21	21	100	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	5	5	100	Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya telah tersusun		
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan telah tersusun		

B. Realisasi Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya pada Kecamatan Seririt sangat tergantung dari Bantuan Keuangan Daerah melalui APBD Kabupaten Buleleng. Kecamatan Seririt pada Tahun 2025 setelah perubahan melaksanakan 5 (lima) program, 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 40 (Empat puluh) sub kegiatan serta mengelola anggaran belanja dengan pagu sebesar Rp. 8.598.694.124 dan realisasi sebesar Rp. 8.165.013.361 atau 94,97%. Rekapitulasi realisasi anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN KECAMATAN SERIRIT TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	- Belanja Pegawai	6.781.274.963	6.476.331.696	95,50
2	- Belanja Barang dan Jasa	1.708.299.161	1.581.362.665	92,57
3	- Belanja Modal	109.120.000	108.119.000	99,08
	Belanja Daerah	8.598.694.124	8.165.813.361	94,84

Secara umum, akuntabilitas keuangan Kecamatan Seririt sudah baik karena kemampuan menyerap anggaran Belanja Daerah, dimana dari 40 (Empat puluh empat) sub kegiatan mampu menyerap anggaran 94,97 persen. Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Seririt tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7,831,250,793.00	7,446,577,788.00	95,09
	1.1Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,042,528.00	45,451,721.00	99,72
	1.1.1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43,042,528.00	42,682,096.00	99,16
	1.1.2Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000.00	914,375.00	91,44
	1.1.3Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1,000,000.00	921,950.00	92,20
	1.1.4Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	1,000,000.00	933,300.00	93,33
	1.2Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,879,594,927.00	6,574,202,060.00	95,56
	1.2.1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,781,274,963.00	6,476,331,696.00	95,50
	1.2.2Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15,596,692.00	15,505,892.00	99,42
	1.2.3Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81,323,272.00	81,034,972.00	99,65
	1.2.4Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700,000.00	672,000.00	96,00
	1.2.5Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD	700,000.00	657,500.00	93,93
	1.3Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700,000.00	657,500.00	93,93
	1.2.6Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	700,000.00	657,500.00	93,93
	1.4Administrasi Umum Perangkat Daerah	291,950,770.00	253,834,508.00	86,94
	1.4.1Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	7,800,000.00	6,831,255.00	87,58
	1.4.2Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232,070,770.00	217,836,240.00	93,87
	1.4.5Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00	4,645,500.00	92,91
	1.4.6Fasilitas Kunjungan Tamu	27,000,000.00	22,041,513.00	81,64
	1.4.8Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,080,000.00	2,480,000.00	12,35
	1.5Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564,747,568.00	528,592,069.00	93,60
	1.5.1Penyediaan Jasa Surat Menyurat	389,370,455.00	376,513,912.00	96,70
	1.5.3Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,400,050.00	50,339,908.00	78,17
	1.5.5Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,999,909.00	85,277,875.00	94,75
	1.5.6Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,977,154.00	16,460,374.00	76,47
	1.6Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,215,000.00	43,839,930.00	90,93
	1.6.1Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3,750,000.00	3,491,900.00	93,12
	1.6.2Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,465,000.00	40,348,030.00	90,74
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	106,044,934.00	104,218,419.00	98,28
	2.2Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	97,044,934.00	95,806,839.00	98,72
	2.2.1Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97,044,934.00	95,806,839.00	98,72
	2.3Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9,000,000.00	8,411,580.00	93,46
	2.3.2Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	9,000,000.00	8,411,580.00	93,46

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		406,071,240.00	360,478,032.00	88,77
	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	188,721,954.00	179,727,032.00	95,23
	3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	188,721,954.00	179,727,032.00	95,23
	3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	217,349,286.00	180,751,000.00	83,16
	3,2,1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	109,120,000.00	108,119,000.00	99,08
	3,2,2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108,229,286.00	72,632,000.00	67,11
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		91,908,092.00	90,976,507.00	98,99
	4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8,500,000.00	8,107,925.00	95,39
	4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8,500,000.00	8,107,925.00	95,39
	4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	83,408,092.00	82,868,582.00	99,35
	4.2.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	83,408,092.00	82,868,582.00	99,35
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		163,419,065.00	152,762,615.00	93,48
	5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163,419,065.00	152,762,615.00	93,48
	5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3,000,000.00	838,975.00	27,97
	5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	39,957,524.00	39,456,291.00	98,75
	5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,957,000.00	1,820,375.00	93,02
	5.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7,270,000.00	6,940,000.00	95,46
	5.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2,036,500.00	-	0
	5.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1,397,000.00	1,315,625.00	94,18
	5.1.7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa	1,897,500.00	1,768,525.00	93,20
	5.1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	46,446,562.00	44,397,577.00	95,59
	5.1.10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	47,559,979.00	45,059,272.00	94,74
	5.1.11	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2,500,000.00	2,294,725.00	91,79
	5.1.12	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan penegasan Batas Desa	1,397,000.00	1,318,100.00	94,35
	5.1.14	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8,000,000.00	7,553,150.00	94,41
			8,598,694,124.00	8,165,813,361.00	94,97

Untuk mengetahui realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Seririt pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60,12%	95,09
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	94,41 %	98,63
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	3,01%	88,77
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	3,02	93,48

Tabel 3.19

Realisasi Anggaran Per Indikator

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	7.568.761.414	7.213.219.894	95,30
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	197.953.220	195.194.926	98,63
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	188.721.954	179.727.032	95.23
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	163.419.065	152.762.615	93,48

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Seririt berpedoman pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Dengan telah dibuatnya LKjIP Kecamatan Seririt, maka akan dapat diketahui seberapa besar kinerja yang telah dicapai oleh SKPD, dengan harapan dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Selanjutnya jika dilihat secara umum Kecamatan Seririt dalam Tahun Anggaran 2025 capaian kinerja dan sasaran telah mampu mewujudkan kinerja dengan kategori baik serta secara khusus capaian kinerja yang telah dicapai akan menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan program berikutnya terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, budaya dan berintegritas berlandaskan Tri Hita Karana.

Keberhasilan dalam pencapaian atas target kinerja yang telah ditentukan senantiasa masih tidak dapat luput dari berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi, antara lain yaitu adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima; kapasitas aparatur kecamatan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang; belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja melayani.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas adapun strategi yang dilakukan antara lain membangun system pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal; meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan lainnya; serta membangun sistem kerja organisasi, pola pikir, perilaku, nilai-nilai, dan keyakinan ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, dan berintegritas selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder. Namun demikian segala kekurangan dan kelemahan tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di tahun mendatang.

Seririt, 2 Januari 2026


CAMAT SERIRIT

I PUTU SATRIAWAN, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19840525 201001 1 029

LAMPIRAN - LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA								
KECAMATAN SERIRIT PERIODE 2025-2029								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Formulasi / Perhitungan		Sumber Data	Keterangan
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	Tercapaiannya Kinerja Perangkat daerah (capaian kinerja tahun berkenaan perangkat daerah dalam satuan persen)	Nilai Perencanaan Kinerja + Nilai Pengukuran Kinerja + Nilai Pelaporan Kinerja + Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat	Capaian kinerja perangkat daerah
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	%	Tercapainya kinerja pelayanan di kecamatan (rata2 capaian kinerja pelayanan dan trantibumlinmas tahun berkenaan dalam satuan persen)	Capaian Kinerja Pelayanan + trantibumlinmas 2	X 100%	1. Persentase Pelayanan kewenangan Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat
							2. Persentase Koordinasi Trantibumlinmas yang ditinjaulanjuti	Persentase capaian koordinasi trantibumlinmas
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	%	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (dalam satuan persen)	Realisasi desa dengan laporan swadaya murni jumlah desa di Kecamatan Seririt	X 100%	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	%	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa (dalam satuan persen)	Jumlah administrasi desa dengan katagori baik jumlah desa di Kecamatan Seririt	X 100%	Persentase tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Desa yang pelaporannya tepat waktu

Seririt, 24 Oktober 2025

CAMAT SERIRIT



I PUTU SATRIAWAN, SH., MH
Penata Tk. I (IV/a)
NIP. 198405252010011029



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SERIRIT

Jalan PB Sudirman No. 59 A, Kode Pos 81153 Telp. (0362) 92301
Website : seririt.bulelengkab.go.id, Email: kecamatanseririt@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Putu Satriawan,SH.,MH
Jabatan : Camat Seririt

Selanjutnya di sebut Pihak pertama.

Nama : I Nyoman Sutjidra
Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan langsung Pihak pertama, Selanjutnya di sebut Pihak Kedua.

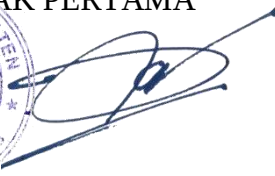
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasiterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Seririt, 24 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

I Nyoman Sutjidra

PIHAK PERTAMA

I Putu Satriawan,SH.,MH
NIP. 19840525 201001 1 029

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN SERIRIT TAHUN 2025

NO.	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET/SATUAN	
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang adaptif	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60.12	Nilai
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pubik di Kecamatan	93.15	%
3	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	0.40	%
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	2.94	%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 106.044.934	DAU, PBHP
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.568.761.414	DAU, PAD, SILPA,PBHP
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 188.721.954	DAU, PBHP
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 163.419.065	DAU, PBHP
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 91.908.092	DAU, PBHP

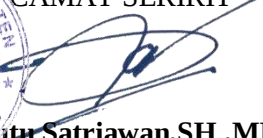
BUPATI BULELENG



Nyoman Sutjidra



Seririt, 24 Oktober 2025
CAMAT SERIRIT



Putu Satriawan,SH.,MH
NIP. 1984 0525 201001 1 029



LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 7 (UNSUR KEWILAYAHAN)
UNIT ORGANISASI : 7.01 (KECAMATAN)
LAPORAN CAPAIAN BULAN : DESEMBER
RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2025

JUMLAH PROGRAM	5
JUMLAH KEGIATAN	13
JUMLAH SUB KEGIATAN	40

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN			INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
					ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)			(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
7.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		persentase Peningkatan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,831,250,793.00	100.00	7,446,577,788.00	100.00	%	95.09	100.00	
7.01.01.2.01		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan	46,042,528.00	100.00	45,451,721.00	100.00	%	98.72	100.00	
7.01.01.2.01.01		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran (RKA, DPA, DPA pergeseran, RDPPA dan DPPA)	43,042,528.00	16.00	42,682,096.00	16.00	Dokumen	99.16	100.00	99,16
7.01.01.2.01.01		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000.00	12.00	914,375.00	12.00	Laporan	91.44	100.00	91,44
7.01.01.201.0008		1.1.3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1,000,000.00	1.00	921,950.00	1.00	Dokumen	92.20	100.00	92,20

7.01.01.201.0009		1.1.4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dandipriksa lingkup Perangkat Daerah	1,000,000.00	1.00	933,300.00	1.00	Data	93.33	100.00	93,33
7.01.01.2.02		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	6,879,594,927.00	100.00	6,574,202,060.00	100.00	%	95.56	100.00	95,56
7.01.01.2.02.01		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,781,274,963.00	56.00	6,476,331,696.00	56.00	Orang	95.50	100.00	95,50
7.01.01.2.02.02		1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	15,596,692.00	2.00	15,505,892.00	2.00	Dokumen	99.42	100.00	99,42
7.01.01.2.02.03		1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	81,323,272.00	6.00	81,034,972.00	6.00	Dokumen	99.65	100.00	99,65
7.01.01.2.02.05		1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	700,000.00	12.00	672,000.00	12.00	Laporan	96.00	100.00	96,00
7.01.01.2.02.07		1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	700,000.00	12.00	657,500.00	12.00	Laporan	93.93	100.00	93,93
7.01.01..2.03		1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	700,000.00	100.00	657,500.00	100.00	100.00	93.93	100.00	93,93
7.01.01.2.03.05		1.2.6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	700,000.00	12.00	657,500.00	12.00	Laporan	93.93	100.00	93,93
7.01.01.2.05		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	291,950,770.00	100.00	253,834,508.00	100.00	100.00	86.94	100.00	86,94
7.01.01.2.06.01		1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	7,800,000.00	8.00	6,831,255.00	8.00	Paket	87.58	100.00	87,58
7.01.01.2.06.04		1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	232,070,770.00	14.00	217,836,240.00	14.00	Paket	93.87	100.00	93,87
7.01.01.2.06.06		1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang undangan yang disediakan	5,000,000.00	1.00	4,645,500.00	1.00	Dokumen	92.91	100.00	92,91
7.01.01.2.06.08		1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	27,000,000.00	4.00	22,041,513.00	4.00	Laporan	81.64	100.00	81,64
7.01.01.2.06.09		1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,080,000.00	2.00	2,480,000.00	2.00	Laporan	12.35	100.00	12,35
7.01.01.2.08		1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan	564,747,568.00	100.00	528,592,069.00	100.00	%	93.60	100.00	93,60

				Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan								
7.01.01.2.08.01		1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	389,370,455.00	5.00	376,513,912.00	5.00	Laporan	96.70	100.00	96,70
7.01.01.2.08.02		1.5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	64,400,050.00	7.00	50,339,908.00	7.00	Laporan	78.17	100.00	78,17
7.01.01.2.08.03		1.5.5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	89,999,909.00	3.00	85,277,875.00	3.00	Laporan	94.75	100.00	94,75
7.01.01.2.08.04		1.5.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	20,977,154.00	5.00	16,460,374.00	5.00	Laporan	78.47	100.00	76,47
7.01.01.2.09		1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	48,215,000.00	100.00	43,839,930.00	100.00	%	90.93	100.00	90,93
7.01.01.2.09.01		1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3,750,000.00	17.00	3,491,900.00	17.00	Unit	93.12	100.00	93,12
7.01.01.2.09.02		1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	44,465,000.00	17.00	40,348,030.00	17.00	Unit	90.74	100.00	90,74
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pelayanan publik	106,044,934.00	100.00	104,218,419.00	100.00	%	98.28	100.00	98,28
7.01.02.2.02		2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan layanan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	97,044,934.00	100.00	95,806,839.00	100.00	%	98.72	100.00	98,72
7.01.02.2.02.01		2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97,044,934.00	12.00	95,806,839.00	12.00	Laporan	98.72	100.00	98,72
7.01.02.2.03		2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Tindak Lanjut Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9,000,000.00	100.00	8,411,580.00	100.00	%	93.46	100.00	93,46
7.01.02.2.03.02		2.3.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah prasarana dan fasilitas umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta	9,000,000.00	1.00	8,411,580.00	1.00	unit	93.46	100.00	93,46
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Desa dan Kelurahan yang Tertib Administrasi	406,071,240.00	100.00	360,478,032.00	100.00	%	88.77	100.00	88,77

7.01.03.2.01		3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	188,721,954.00	100.00	179,727,032.00	100.00	%	95.23	100.00	95,23
7.01.03.2.01.03		3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	188,721,954.00	21.00	179,727,032.00	21.00	Laporan	95.23	100.00	95,23
7.01.03.2.02		3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	217,349,286.00	100.00	180,751,000.00	100.00	%	83.16	100.00	83,16
7.01.03.2.02.1		3.2,1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana	109,120,000.00	3.00	108,119,000.00	3.00	Unit	99.08	100.00	99,08
7.01.03.2.02.2		3.2,2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108,229,286.00	3.00	72,632,000.00	3.00	Pokmas/ Ormas	67.11	100.00	67,11
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban	91,908,092.00	100.00	90,976,507.00	100.00	%	98.99	100.00	98,99
7.01.04.2.01		4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana dan pembinaan linmas	8,500,000.00	100.00	8,107,925.00	100.00	%	95.39	100.00	95,39
7.01.04.2.01.01		4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	8,500,000.00	21.00	8,107,925.00	21.00	Laporan	95.39	100.00	95,39
7.01.04.2.02		4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	83,408,092.00	100.00	82,868,582.00	100.00	%	99.35	100.00	99,35
7.01.04.2.02.01		4.2.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakkan Peraturan Perundang undangan dan atau kepolisian Negara Republik Indonesia	83,408,092.00	21.00	82,868,582.00	21.00	Laporan	99.35	100.00	99,35
7.01.06	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	163,419,065.00	100.00	152,762,615.00	91.67	%	93.48	91.67	93,48
7.01.06.2.01		5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	163,419,065.00	100.00	152,762,615.00	91.67	%	93.48	91.67	93,48
7.01.06.2.01.01		5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3,000,000.00	20.00	838,975.00	20.00	Dokumen	27.97	100.00	27,97

7.01.06.2.01.02		5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	39,957,524.00	20.00	39,456,291.00	20.00	Dokumen	98.75	100.00	98,75
7.01.06.2.01.03		5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,957,000.00	20.00	1,820,375.00	20.00	Dokumen	93.02	100.00	93,02
7.01.06.2.01.05		5.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7,270,000.00	20.00	6,940,000.00	20.00	Dokumen	95.46	100.00	95,46
7.01.06.2.01.06		5.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pmilihan Kepala Desa	2,036,500.00	20.00	-	-	Dokumen	-	0.00	0
7.01.06.2.01.07		5.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelasanaan tugas dan fungsi Bdan Permusyawaratan Desa	1,397,000.00	20.00	1,315,625.00	20.00	Dokumen	94.18	100.00	94,18
7.01.06.2.01.08		5.1.7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1,897,500.00	20.00	1,768,525.00	20.00	Dokumen	93.20	100.00	93,20
7.01.06.2.01..09		5.1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	46,446,562.00	22.00	44,397,577.00	22.00	Dokumen	95.59	100.00	95,59
7.01.06.2.01.12		5.1.10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban (Lembaga Kemasyarakatan Desa)	47,559,979.00	21.00	45,059,272.00	21.00	Dokumen	94.74	100.00	94,74
7.01.06.2.01.13		5.1.11	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan Pembangunan Pertispatif	2,500,000.00	20.00	2,294,725.00	20.00	Dokumen	91.79	100.00	91,79
7.01.06.2.01.15		5.1.12	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penataan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan Batas Desa	1,397,000.00	21.00	1,318,100.00	21.00	Dokumen	94.35	100.00	94,35
7.01.06.2.01.17		5.1.14	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil koordinasi pendampingan Desa diWilayahnya	8,000,000.00	21.00	7,553,150.00	21.00	Laporan	94.41	100.00	94,41
				Jumlah Total	8,598,694,124.00	100	8,165,813,361.00	98.33		98.97	98.33	96.65

Singaraja, 31 DESEMBER 2025
CAMAT SERIRIT,

I PUTU SATRIAWAN, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198405252010011029

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2025

CAMAT															
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja					Anggaran (Rp)						Penanggung jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	16
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Perangkat Daerah yang adaptif	1	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	60.12	Januari	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	7,568,761,414	Januari	238,343,121	227,134,927	3.00
						Pebruari	-	-	-			Pebruari	845,609,706	676,872,779	8.94
						Maret	-	-	-			Maret	1,622,732,271	1,557,846,434	20.58
						April	-	-	-			April	2,142,445,055	1,978,903,912	26.15
						Mei	-	-	-			Mei	2,785,074,030	2,450,233,378	32.37
						Juni	-	-	-			Juni	3,557,723,047	3,273,883,886	43.26
						Juli	60.12	60.12	%			Juli	4,313,727,495	3,933,957,504	43.26
						Agustus	60.12	60.12	%			Agustus	5,040,640,474	4,523,708,376	59.77

						September	60.12	60.12	%			September	5,891,376,960	5,153,866,128	66.60	
						Oktober	60.12	60.12	%			Oktober	6,605,814,571	5,798,638,226	76.61	
						Nopember	60.12	60.12	%			Nopember	7,293,046,309	6,373,701,829	84.21	
						Desember	60.12	60.12	%			Desember	7,568,761,414	7,213,219,494	95.30	
2	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan yang Optimal	1	Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	%	93.15	Januari	-	-	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayahan Publik	106,044,934	Januari	-	-	-	Camat
						Pebruari	-	-	-			Pebruari	13,808,694	13,808,694	13.02	
						Maret	-	-	-			Maret	27,617,388	41,426,082	39.06	
						April	-	-	-			April	41,426,082	41,426,082	39.06	
						Mei	-	-	-			Mei	58,211,358	55,234,776	52.09	
						Juni	-	-	-			Juni	72,020,052	71,749,920	67.66	
						Juli	-	-	-			Juli	88,283,280	85,558,614	80.68	
						Agustus	-	-	-			Agustus	92,919,141	87,874,439	82.87	
						September	-	-	-			September	92,919,141	91,644,764	86.42	
						Oktober	-	-	-			Oktober	102,544,934	104,018,419	98.09	
						Nopember	-	-	-			Nopember	106,044,934	104,018,419	98.09	
						Desember	93.15	93,15	%			Desember	106,044,934	104,218,419	98.28	
										Program Koordinasi	91,908,092	Januari	-	-	-	

										Ketentraman dan Ketertiban Umum		Pebruari	11,778,572	11,778,572	12.82
												Maret	26,557,144	35,335,716	38.45
												April	38,335,716	35,335,716	38.45
												Mei	53,847,188	49,994,288	54.40
												Juni	65,625,760	58,892,860	64.08
												Juli	77,404,348	79,451,357	64.08
												Agustus	82,202,092	79,451,357	86.45
												September	88,908,092	84,256,507	89.44
												Oktober	88,908,092	84,256,507	91.67
												Nopember	91,908,092	84,256,507	91.67
												Desember	91,908,092	90,976,507	98.99
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	1	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	0.4	Januari				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	188,721,954	Januari	-	-	-
						Pebruari						Pebruari	13,041,708	7,416,708	3.93
						Maret						Maret	26,083,416	28,970,124	15.35
						April						April	38,747,624	28,970,124	15.35
						Mei						Mei	51,704,365	37,507,032	19.87
						Juni						Juni	60,060,240	49,646,240	26.31
						Juli	0.4	0.4	%			Juli	128,900,112	56,491,948	29.93

[illegible]



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

KECAMATAN SERIRIT

Sebagai:

PESERTA

dalam Rangka Lomba Video Potensi dan Peluang Investasi Kecamatan
SE - Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan pada rangkaian HUT
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng yg ke - 2
31 Oktober 2025.



dr. I Nyoman Sutjitra, Sp.OC
Bupati Buleleng

